

PENGARUH INFLASI, PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PENGANGGURAN TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI KOTA SURABAYA

RIZKI AMALIA¹

S1 Ekonomi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia
Email : rizkiamalia.18036@mhs.unesa.ac.id

LUCKY RACHMAWATI²

S1 Ekonomi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia
Email: luckyrachmawati@unesa.ac.id

Abstrak

Studi ini memiliki tujuan untuk melihat apakah ada pengaruh dari Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi dan pengangguran terhadap variabel dependent yaitu Kemiskinan di Kota Surabaya. Teknik pemilihan data didalam penelitian ini memakai data sekunder dengan periode tahunan yang didapat dari Badan Pusat Statistik (BPS) dengan kurun waktu 2006-2019. Hasil dari analisis Regresi Linear Berganda menunjukkan bahwasannya Inflasi dan pertumbuhan ekonomi tidak ada pengaruh terhadap kemiskinan, sedangkan Pengangguran memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Kemiskinan.

Kata Kunci : *Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Kemiskinan*

Abstract

This study aims to see whether there is an effect of inflation, economic growth and unemployment on the dependent variable, namely poverty in the city of Surabaya. The data selection technique in this study uses secondary data with an annual period obtained from the Central Statistics Agency (BPS) for the period 2006-2019. The results of the Multiple Linear Regression analysis show that inflation and economic growth have no effect on poverty, while unemployment has a significant positive effect on poverty.

Keywords: *Inflation, Economic Growth, Unemployment, Poverty*

PENDAHULUAN

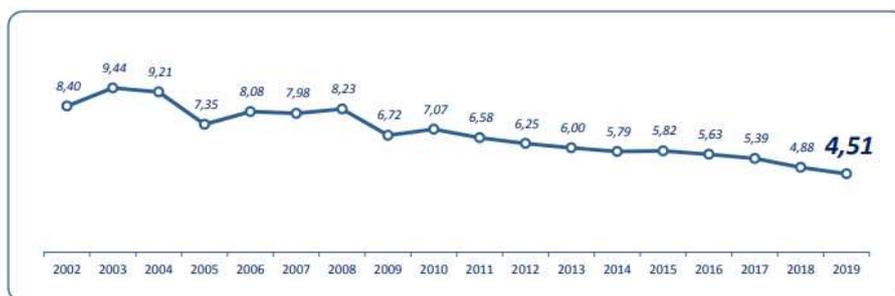
Kemiskinan ialah keadaan dimana adanya ketidakmampuan dalam pemenuhan kebutuhan dasar contohnya sandang, pangan, transportasi, dan pendidikan. Kemiskinan mungkin karena kurangnya alat untuk memenuhi kebutuhan dasar atau mungkin karena kesulitan dalam Pendidikan atau pekerjaan. Menurut Kotze dalam penelitian (Retnowati, 2012) menyatakan bawasannya penduduk miskin mempun yai kapasitas yang baik guna mendapatkan sumber peluang yang tersedia. Meskipun demikian terkadang mendapatkan bantuan

eksternal, akan tetapi belum bisa ditetapkan sehingga penduduk bergantung pada pekerjaannya sendiri. Metode ini dinilai tidak tercapai dikarenakan masyarakat yang bisa bertahan dan berkembang jika terkurung dari kelompok lain.

Kemiskinan dibagi jadi tiga definisi: (1) Kemiskinan relatif yaitu keadaan yang hidup melebihi garis kemiskinan tetapi masih dibawah masyarakat sekitar; (2) Kemiskinan kultural merupakan perilaku seseorang atau sekelompok orang yang tidak ada usaha untuk meningkatkan taraf hidupnya; (3) Kemiskinan absolute yaitu keadaan dimana beberapa orang tidak memperoleh kekuatan yang cukup guna memenuhi keperluan dasar masyarakat. Mereka hidup dibawah garis kemiskinan, kemiskinan absolute adalah situasi kemiskinan paling buruk yang dikadar pada tingkat kapasitas keluarga guna memenuhi keperluan yang paling minim untuk bisa hidup sesuai dengan kehidupan yang layak. (Ishak, dkk., 2020)

Kemiskinan sudah menjadi masalah diberbagai wilayah di Indonesia dan belum ada tanda-tanda berakhir. Masalah kemiskinan di Surabaya cukup pelik karena terdapat berbagai macam keadaan sosial hingga budaya masyarakat dan juga berbagai kondisi kemiskinan yang beragam. Total penduduk miskin di Surabaya mengakibatkan penurunan antara tahun 2015-2019. Hal ini menjelaskan bahwasannya kebijakan pemerintah untuk menangani jumlah penduduk miskin yang telah diterapkan pemerintah Kota Surabaya dalam kurun waktu 2015-2019 cukup maksimal. Menurut hasil survey yang dilakukan BPS Kota Surabaya (2019) seperti yang ada pada gambar berikut:

Gambar 1.
Perkembangan Persentase Penduduk Miskin di Kota Surabaya, 2002 - 2019



Sumber: Susenas 2002 – 2019, diolah menggunakan penimbang hasil proyeksi penduduk.

Dilihat pada tabel diatas di tahun 2015-2019, upaya pemerintah guna menurunkan kemiskinan di Kota Surabaya dinilai cukup berhasil. Keberhasilannya diisyaratkan dengan persentase kemiskinan dari 5,82 pada tahun 2015, pada tahun 2016 turun menjadi 5,63%, pada periode 2017 turun jadi 5,39%, pada periode 2018 kembali turun menjadi 4,88% dan ditahun terakhir sebesar 4,51%. Pada Tahun 2019 tingkat kemiskinan di Surabaya angka kemiskinannya relatif mengalami penurunan namun tidak begitu tajam yaitu 4,51% 3.095.26 jiwa penduduk pada saat itu . Walaupun terjadi kenaikan pada tingkat kemiskinan, total penduduk miskin yang berada di Kota Surabaya pada tahun 2019 mengalami penurunan lebih dari 10.000 orang menjadi nyaris mencapai 131.000 orang atau 4,51% dibandingkan keadaan tahun 2018 yang nyaris mencapai 141.000 orang atau 4,88 % mengalami penurunan persentase penduduk miskin (P0) kurang lebih 0,37%. Pada bulan Maret

2020 naik menjadi 155.670 jiwa penduduk miskin di Surabaya. Kenaikan angka penduduk miskin pada Maret 2020 bertepatan dengan masa pandemi Covid-19 yang membawa dampak pada naiknya tingkat kemiskinan. Menurut BPS (2019) disaat jumlah masyarakat miskin berkurang, maka masyarakat miskin yang tersisa kemungkinan akan masuk dalam kategori kemiskinan kronis.

Banyak opini bahwasannya pertumbuhan yang pesat akan berdampak buruk terhadap masyarakat miskin dikarenakan mereka bakal tersingkirkan dari perubahan struktural era modern. Disisi lain, adanya buah pikir yang hebat tersampaikan di kalangan pembuat kebijakan bahwasannya dana umum yang dipergunakan guna mengentas kemiskinan akan diambil dari dana yang bisa dipergunakan guna melajukan pertumbuhan. Opini yang mengungkapkan bahwasannya dibutuhkan pemfokusan guna menurunkan angka kemiskinan dapat melambatkan pertumbuhan setara dengan pendapat yang mengungkapkan bahwasannya kasta sosial yang rendah dapat menimbulkan pertumbuhan yang lambat pula. Menurut Todaro (2014) dalam penelitian (Nainggolan, 2020) apabila ada redistribusi pendapatan maupun aset oleh penduduk kaya ke penduduk miskin, bahkan apabila lewat pajak progresif, memiliki kecemasan bahwasannya total tabungan dapat menurun.

PDRB yaitu suatu indikator inti dalam mengukur kapasitas disuatu perekonomian. Terlebih dalam analisis hasil usaha dalam melaksanakan pembangunan ekonomi yang telah dilakukan oleh suatu negara. PDRB menampilkan seberapa jauh kegiatan perekonomian yang menghasilkan penambahan untuk pendapatan dalam periode tertentu. Perekonomian Kota Surabaya periode 2019 yang diukur menurut PDRB ADHB menginjak Rp. 580.488.529,01 dan PDRB perkapita mencapai Rp 98.778.360,36. Nilai PDRB Kota Surabaya menurut ADHB tahun 2018 sejumlah Rp547.769.496.960.000 ini cukup meningkat dibandingkan periode 2017 sejumlah Rp495.043.304.500.000. Kemampuan kerja pada sektor perekonomian dapat membentuk PDRB periode 2018 menimbulkan kenaikan yang beragam tapi bisa lebih tinggi dari tahun terdahulu. Terdapat penurunan kemiskinan diwilayah kota Surabaya mengindikasi bahwasannya pembangunan yang dilakukan sudah membawa keberhasilan. Pembangunan ekonomi bisa dinilai menggunakan pertumbuhan ekonomi yang bisa dipantau dari perkembangan PDRBnya. PDRB mempunyai korelasi dengan kemiskinan baik lewat agregat atau sektor-sektor ekonomi individual. Menurut Kuncoro dalam (Waruwu, 2016) indikator dalam pembangunan antara lain: 1) Indikator ekonomi yakni PNB, PDB, serta laju PDRB, 2) indikator sosial yakni: IPM. Adapula inflasi yang diduga ada pengaruh terhadap angka kemiskinan.

Inflasi yaitu kondisi perekonomian menjadikan kenaikan harga-harga secara umum. Menurut teori Keynes, inflasi ada ketika penduduk mau bergerak melebihi batas kemampuan dari pendapatannya. Dimana seharusnya inflasi menjadi variabel makro ekonomi selain pertumbuhan serta pengangguran yang seharusnya mendapat lirik lebih dari pemerintahan guna mempertahankan tingkat kestabilannya. Inflasi yaitu suatu faktor perekonomian yang penting, laju pertumbuhannya akan diusahakan untuk merendah atau tidak naik agar tidak mengakibatkan permasalahan makro ekonomi yang nantinya diduga mengakibatkan ketidakstabilan didalam perekonomian. Inflasi mempunyai

pengaruh positif dan negatif terhadap perekonomian di suatu wilayah. Yudha (2019) pengaruh inflasi dapat dibedakan menjadi 2 aspek yakni berakibat pada perekonomian yang meliputi Inflasi menjunjung penanaman modal, tingkat bunga dapat mengurangi investasi, adanya defisit didalam neraca perdagangan serta juga meningkatkan banyaknya utang luar negeri dan juga berakibat terhadap individu/masyarakat yang meliputi mengurangi distribusi pendapatan, pendapatan riil merosok serta nilai tabungan ikut merosot.

Inflasi memiliki peranan inti dalam aktifitas pengurangan kemiskinan serta pengangguran di Kota Surabaya. Selama periode 2006-2019 inflasi kota Surabaya mengalami fluktuatif dan condong mengalami pemerosotan. Ini sangat bagus untuk ekonomi Kota Surabaya dikarenakan semakin sedikit tingkat inflasi maka semakin sedikit pula tingkat kemiskinan juga penganggurannya. Tingkat Inflasi Kota Surabaya menurut BPS Jatim hingga akhir triwulan I tahun 2018 bulan maret 2018 sejumlah 3,03%, artinya lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sejumlah 4,37%. Angka inflasi Kota Surabaya lebih banyak dibandingkan dengan inflasi Jawa Timur sejumlah 3,16% , namun angka ini masih setara dengan tujuan inflasi pemerintah pada 2017 sejumlah 4,34%. Angka Inflasi pada kota Surabaya pada 2018 selaras dengan target tujuan inflasi pemerintahan, pada periode 2018 angka inflasi sejumlah $3,5 \pm 1 \%$, bisa diamati pada gambar berikut:



Gambar II.
Inflasi Kota Surabaya (persen) Tahun 2014-2018
Sumber data: BPS Kota Surabaya dan Bappeko Surabaya, diolah, Februari 2019,

Capaian tingkat inflasi kota Surabaya periode 2018 sedikit membaik, dimana 3 tahun belakangan inflasi Surabaya selalu lebih tinggi dari pada inflasi Jawa Timur dan nasional, namun pada tahun 2018 meskipun lebih tinggi dari inflasi Jawa Timur tetapi masih lebih rendah dari Nasional. Inflasi perlu dihindari karenanya bisa berakibat buruk terhadap perekonomian. Disamping inflasi, terdapat faktor lainnya yang diduga mempunyai pengaruh terhadap kemiskinan yaitu pengangguran.

Pengangguran yaitu suatu masalah kompleks yang ditemui pada negara berkembang contohnya Indonesia. Menurut pandangan makro ekonomi, angka pengangguran yang tinggi yakni persoalan bagi suatu perekonomian. Menurut putri nasution(2018) Pengangguran memiliki hubungan negatif terhadap kemiskinan, karena tingkat pengangguran yang tinggi dalam suatu daerah dapat mengakibatkan pertumbuhan ekonomi yang menurun. Menurut BPS (2020) indikator yang dipergunakan dalam mengukur pengangguran yakni Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Dengan adanya TPT menggambarkan bahwa adanya ketidakseimbangan antara ketersediaan lapangan pekerjaan dengan masyarakat yang berusaha untuk mendapat pekerjaan dengan lapangan kerja yang minim. Upaya untuk mengurangi pengangguran serta kemiskinan adalah sama-sama penting. Selain itu, pengangguran dikategorikan berdasarkan ciri – ciri sebagai berikut :

1. Pengangguran Tersembunyi, hal ini bisa terjadi jika penambahan yang dilakukan pada tenaga kerja yang dilakukan tentu tidak memperoleh tingkat produksi yang menghasilkan.
2. Pengangguran Musiman, hal ini dapat terjadi ketika adanya peralihan musim yang sedang terjadi pada sektor bagian perikanan dan pertanian.
3. Setengah Menganggur, hal ini terbentuk manakala dampak migrasi dari desa kepada perkotaan dengan frekuensi yang tinggi sehingga sebagian tidak memperoleh pekerjaan
4. Pengangguran Terbuka, terjadi pada situasi penambahan lowongan pekerjaan yang kurang memadai daripada pertambahan pada pekerja dampaknya semakin banyaknya kuantitas pekerja yang belum dapat pekerjaan.

TPT bisa mendorong kemiskinan banyak cara yaitu ketika salah satu keluarga mempunyai arti likuiditas yang berarti konsumsi sekarang sangat dipengaruhi adanya pemasukan sekarang maka tingkat pengangguran secara langsung mendorong tingkat kemiskinan baik dari sisi pendapatan maupun konsumsi dan apabila rumah tangga tersebut tidak memiliki likuiditas artinya konsumsi sekarang tidak selalu didorong oleh pendapatan maka dari meningkatnya pengangguran dapat menimbulkan peningkatan kemiskinan jangka panjang, namun tidak cukup berpengaruh pada waktu singkat.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Desrini&Puti:2018) mengemukakan bahwa salah satu variable yang mempengaruhi kemiskinan ialah inflasi, karena inflasi memiliki pengaruh signifikansi serta positif terhadap PDRB. Apabila inflasi bertambah maka kemiskinan juga bertambah, dan sebaliknya. PDRB tidak terdapat pengaruh signifikansi terhadap kemiskinan dikarenakan bertambahnya PDRB tidak dapat menanggulangi kemiskinan.

Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan oleh (Retnowati, 2012) mengemukakan bahwasannya hasil pengangguran berpengaruh secara signifikansi terhadap kemiskinan di wilayah Jawa Tengah. Naiknya angka pengangguran ini memiliki pengaruh positif yang mengakibatkan kemiskinan bertambah. Pengangguran dapat menurunkan pendapatan masyarakat, sehingga tingkat kemakmuran akan menurun. Keperluan penduduk yang beragam mengakibatkan

mereka berusaha untuk mengasak keperluannya, hal ini dapat dikerjakan yakni bekerja guna memperoleh penghasilan.

Tujuan penelitian ini yaitu guna mengetahui apakah ada pengaruh antara inflasi dengan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi dengan kemiskinan, serta pengangguran dengan kemiskinan.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini memakai metode kuantitatif serta dilakukan pendekatan Eksplanatori. Metode analisis yang dipergunakan yaitu regresi linier berganda. Populasi didalam riset ini yakni semua data kemiskinan, inflasi, pertumbuhan ekonomi serta pengangguran diambil dari Badan Pusat Statistika Kota Surabaya. Data yang dipergunakan didalam penelitian ini yaitu data sekunder dengan periode tahunan.

Metode analisa data memakai regresi linier berganda, serta mengolah data memakai *software* SPSS 22. Analisis data dilaksanakan dengan cara mengecek nilai statistik variabel menggunakan suatu perangkat lunak. Dalam analisa ini diinginkan mampu dipergunakan untuk melihat seberapa besar adanya pengaruh variabel dependent dengan variabel independent. Peneliti memakai uji asumsi klasik sebagai metode analisis data yang meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji auto kotelasi, uji linieritas, uji t dan uji F model regresi pada penelitian ini yaitu:

$$Y_t = \beta_0 + \beta_1 X_{t-1} + \beta_2 X_{t-2} + \beta_3 X_{t-3} + e_t$$

Dimana :

Y	= Tingkat Kemiskinan
β_0	= Konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3$	= Koefisien variable independen
X_1	= Inflasi
X_2	= Pertumbuhan Ekonomi
X_3	= Pengangguran
$t-1, t-2, t-3$	= Variabel Bebas Pada Waktu
e_t	= <i>Error term</i>

Hipotesis pada penelitian ini diantaranya sebagai berikut :

- H₀₁ : Tidak adanya pengaruh Inflasi terhadap Kemiskinan
- H_{a1} : Adanya pengaruh Inflasi terhadap Kemiskinan
- H₀₂ : Tidak adanya pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan
- H_{a2} : Adanya pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan
- H₀₃ : Tidak adanya pengaruh Pengangguran terhadap Kemiskinan
- H_{a3} : Adanya pengaruh Pengangguran terhadap Kemiskinan

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2016:164) uji normalitas dilaksanakan apabila dalam model regresi variabel independent serta variabel dependen atau keduanya memiliki perputaran normal maupun tidak. Apabila variabel tidak berdistribusi secara normal maka hasil uji statistik akan mengalami penurunan. Uji normalitas dapat dikerjakan menggunakan One Sample Kolmogorov Smirnov yaitu dengan ketentuan apabila nilai signifikan diatas 0,05 maka data berdistribusi normal dan sebaliknya. Pada uji normalitas Kolmogorov Smirnov didapat hasil sig. sebesar $0,200 > 0,050$ sehingga disimpulkan data tersebut berdistribusi normal.

2. Uji Multikolinearitas

Multikolinieritas berada pada relasi linier yang secara sempurna maupun terdefinisi diantara variabel bebas dalam regresi linier berganda, serta tidak boleh terdapat hubungan antara variabel bebas. Selesai diadakan uji analisis regresi linier berganda didapati bahwa adanya dari ketiga variabel bebas VIF untuk X1 sebesar 1,535; X2 1,354; X3 1,338 yang menjelaskan ketiga variabel tbebas ini lebih kecil dari 10 maka didalam model regresi ini tidak terjadi multikolenieritas.

3. Uji Heteroskedastisitas

Pada uji glejser ini terdapat hasil dari sig. pada variabel Inflasi $0,643 > 0,05$ variabel pertumbuhan ekonomi $0,324 > 0,05$; variabel pengangguran $0,294 > 0,05$ maka mampu disimpulkan bahwa tidak mengalami gejala heteroskedastisitas dalam model regresi.

4. Uji Autokorelasi

Dari hasil uji autokorelasi dengan Durbin Watson sejumlah 2,003 dari tabel DW didapatkan nilai DU sebesar 1,7788. Apabila berdasarkan rumus dapat dirumuskan sebagai berikut:

Rumus: $DU < DW < 4 - DU$

$$1,7788 < 2,003 < 4 - 1,7788$$

$$1,7788 < 2,003 < 2,2212$$

Berdasarkan rumus diatas maka mampu disimpulkan bahwa tidak ada gejala Autokorelasi.

Uji Hipotesis

Uji Hipotesis memiliki tujuan yaitu untuk melihat baik secara simultan maupun parsial pengaruh variabel *Independent* terhadap variabel *Dependen*.

1. Uji t parsial

Berdasarkan hasil perhitungan output SPSS dapat diketahui bahwa pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen sebagai berikut:

- Variabel Inflasi memiliki nilai $t_{\text{statistik}}$ sebesar 0,797 pada tingkat signifikan $\alpha = 0,05$ persen, diperoleh nilai t_{tabel} sebesar 1,76131 nilai absolute $t_{\text{statistik}} < t_{\text{tabel}}$ ($0,797 < 2,228$) berarti H_0_1 ditolak.
- Variabel Pertumbuhan Ekonomi memiliki nilai $t_{\text{statistik}}$ sebesar 0,467 pada tingkat signifikan $\alpha = 0,05$ persen, diperoleh nilai t_{tabel} sebesar 1,76131 nilai absolute $t_{\text{statistik}} < t_{\text{tabel}}$ ($0,467 < 2,228$) berarti H_0_2 ditolak.
- Variabel Pengangguran memiliki nilai $t_{\text{statistik}}$ sebesar 3,411 pada tingkat signifikan $\alpha = 0,05$ persen, diperoleh nilai t_{tabel} sebesar 1,76131 nilai absolute $t_{\text{statistik}} > t_{\text{tabel}}$ ($3,411 > 2,228$) berarti H_0_3 diterima.

2. Uji f simultan

Pada tabel Anova diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 5,814 pada tingkat signifikansi sebesar 0,005 melainkan, nilai $F_{\text{tabel}} = (\alpha = 0,05)$ dengan *degree of freedom (df)* 3 (jumlah variabel bebas/k) dan df_2 9 ($n-k-1$) memperoleh nilai F_{tabel} sebesar 8,81. Dari hasil dapat diketahui bahwa $F_{\text{hitung}} 5,814 > F_{\text{tabel}} 8,81$ dan dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak.

Koefisien Determinan (R^2)

Hasil uji yang tercantum pada tabel Model Summary, nilai R-Square adalah 0,660 yang artinya variabel Y berpengaruh oleh variabel X1, X2 dan X3 secara bersamaan sebesar 66% dan sisanya sebesar 34% dipengaruhi oleh variabel lain pada luar penelitian.

PEMBAHASAN

1. Pengaruh Inflasi terhadap Kemiskinan

Menurut hasil uji Inflasi (X1) didapati hasil H_0_1 ditolak. Dapat diartikan tidak terdapat pengaruh inflasi terhadap kemiskinan sehingga hasil tidak dapat diinterpretasikan. Inflasi secara umum dilihat sebagai persoalan pokok yang wajib segera dituntaskan. Mengurangi laju inflasi merupakan suatu upaya dari kebijakan ekonomi yang dikenal dengan istilah kebijakan stabilitas harga. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh (Hambar Sari & Inggit, 2016) menyebutkan tidak adanya pengaruh nyata (signifikan) dan positif terhadap kemiskinan, menurut jurnal tersebut ada beberapa hal yang menyebabkan inflasi tidak berpengaruh terhadap kemiskinan yaitu inflasi yang termasuk ringan yang ada di Jawa Timur tidak tentu

memberikan efek negatif tetapi membawa efek positif juga. Efek positifnya yaitu inflasi bisa memajukan perekonomian yang lebih baik lagi dengan meningkatnya pendapatan nasional dengan membuat seseorang mempunyai gaira bekerja, menabung, berinvestasi. Inflasi mempengaruhi individu, pengusaha dan pemerintah.

2. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan

Menurut hasil pengujian PDRB (X_2) didapati H_0 ditolak, maka dari itu tidak didapati pengaruh antara Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan sehingga tidak dapat diinterpretasikan. Artinya meningkatnya PDRB belum layak menanggulangi masalah kemiskinan yang ada. Fenomena ini terjadi dikarenakan adanya ketidakmerataan pembangunan yang terjadi di masyarakat lapisan bawah, dengan kata lain ekonomi yang tinggi belum bisa dipastikan bisa menurunkan jumlah penduduk miskin. Ini sejalan dengan riset dari (Hambar Sari & Inggit, 2016) menurutnya PDRB tidak memiliki pengaruh terhadap kemiskinan atau dengan istilah lain meningkatnya PDRB tidak dapat menurunkan kemiskinan. Peluang yang terjadi yaitu arus keuangan dan pendapatan menengah keatas atau dengan istilah lain terdapat ketidak merataan pendapatan. Namun pada hasil penelitian (Ishak, dkk., 2020) diketahui bahwa nilai sig sebesar 0,001 lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05. Pertumbuhan ekonomi dan pengangguran secara bersama-sama berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kota Makassar, maka dari itu keadaan PDRB memiliki korelasi kuat dan sejalan dengan tingkat kemiskinan.

3. Pengaruh Pengangguran Terhadap Kemiskinan

1. Menurut hasil uji Pengangguran antara Pengangguran terhadap kemiskinan oleh karena itu H_0 diterima. Guna mengurangi angka kemiskinan, maka angka pengangguran juga harus dikurangi, penurunan tingkat kemiskinan akan berhasil jika lapangan kerja mampu menyerap pekerja yang ada, terutama dalam sektor-sektor industri dan meluas disetiap golongan pendapatan, termasuk dikategori masyarakat miskin. Semakin menurunnya tingkat kemakmuran semakin menimbulkan masalah kemiskinan. Masalah banyaknya masyarakat yang masih menganggur dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yakni ketidaksesuaian antara kompetensi dan kualifikasi pekerja yang dibutuhkan dunia kerja saat ini. Hasil riset ini selaras dengan hasil riset yang dilakukan oleh Rosalia (2019) yakni tingkat pengangguran memiliki pengaruh signifikan serta berhubungan positif terhadap tingkat kemiskinan. namun berlainan dengan hasil riset yang dilakukan oleh (Yacoub, 2012) ialah pengangguran terdapat pengaruh negatif terhadap angka kemiskinan dipengaruhi oleh banyak pekerja yang bekerja disektor pertanian turut hampir seluruh keluarga akan tetapi dengan penghasilan rendah sehingga tidak akan cukup untuk memenuhi keperluan keluarga. Sehingga

meskipun angka pengangguran cukup rendah dikarenakan sebagian dari mereka bekerja, tetapi mereka tetap tidak mampu. Faktanya secara harfiah kabupaten kota dengan angka pengangguran yang besar memiliki kecenderungan dengan angka kemiskinan yang relatif kecil, demikian pula sebaliknya. Ketidakterseediaanya lapangan pekerjaan yang banyak menyebabkan terjadinya pengangguran dan menyebabkan pendapatan masyarakat rendah sehingga akan menyebabkan peningkatan kemiskinan.

KESIMPULAN

Riset ini ditujukan guna menganalisa pengaruh Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi serta Pengangguran terhadap Kemiskinan di Surabaya saat periode 2006-2019. Sesuai dengan latar belakang, dan tujuan maka dapat disimpulkan bahwa Inflasi dan PDRB tidak memiliki pengaruh terhadap kemiskinan di Kota Surabaya, sebaliknya Pengangguran ternyata memiliki pengaruh secara positif terhadap Kemiskinan. Ini diakibatkan dengan keperluan penduduk yang beragam mengakibatkan mereka berusaha untuk mengasak keperluannya, hal ini dapat dikerjakan yakni bekerja guna memperoleh penghasilan. Guna mengurangi angka kemiskinan, maka angka pengangguran juga harus dikurangi, penurunan tingkat kemiskinan akan berhasil jika lapangan kerja mampu menyerap pekerja yang ada, terutama dalam sektor-sektor industri dan meluas disetiap golongan pendapatan, termasuk dikategori masyarakat miskin. Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengangguran secara simultan atau secara bersamaan memiliki pengaruh pada tingkat kemiskinan di Surabaya. Dengan koefisien determinan sebanyak 0,660 yang menjelaskan bahwa inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan pengangguran memberikan pengaruh simultan sebesar 0,660% terhadap tingkat kemiskinan dan sisanya sebesar 34% dipengaruhi oleh variabel pada luar penelitian.

Meskipun inflasi dan pertumbuhan ekonomi tidak memiliki pengaruh terhadap kemiskinan tetapi pemerintah tetap harus mengontrol serta menjaga angka inflasi agar barang mengalami kenaikan terutama keperluan pokok. PDRB yang tinggi diharapkan mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat guna mencapai kemajuan dan kemakmuran pada suatu bangsa dan daerah PDRB menilai prestasi dari suatu perkembangan perekonomian dari suatu tahun ke tahun berikutnya. Dari tahun ke tahun kemampuan negara guna menghasilkan barang serta jasa akan meningkat ini dipengaruhi oleh beberapa macam faktor produksi dimana selalu mengalami peningkatan kuantitas dan kualitasnya. Dengan disediakannya lapangan pekerjaan yang sangat memadai untuk masyarakat kota Surabaya ini bisa mengurangi jumlah pengangguran, dan dengan demikian bisa mengurangi jumlah kemiskinan .

REFERENSI

- Permadhy, Y. T. (2020). Permadhy, Yul Tito, “Faktor penyebab pengangguran dan strategi penanganan permasalahan pengangguran pada desa bojongcae, cibadak lebak provinsi banten,” vol.2, pp. 54-63, 2020. *Ikra-Ith Ekonomika*, 2(3), 54–63. <https://journals.upi-yai.ac.id/index.php/IKRAITH-EKONOMIKA/article/view/583>
- Susanto, R., & Pangesti, I. (2021). Pengaruh Inflasi Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Indonesia. *JABE (Journal of Applied Business and Economic)*, 7(2), 271. <https://doi.org/10.30998/jabe.v7i2.7653>
- Diah Retnowati, D. (n.d.). *PENGARUH PENGANGGURAN TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI JAWA TENGAH Oleh*. 608–618.
- Hambarsari, P. D., & Inggit, K. (2016). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, pertumbuhan kependudukan dan inflasi terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Timur Tahun 2004-2014. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 1(2), 257–282.
- Ishak, R. A., Zakaria, J., & Arifin, M. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kota Makassar. *Paradoks: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 3(2), 41–53.
- (Yacoub, Y. (2012). Pengaruh Tingkat Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten / Kota di Provinsi Kalimantan Barat. 8, 176–185.)
- Nainggolan, E. (2020). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Sumatera Utara (2010-2019). *Jurnal Manajemen Bisnis Eka Prasetya : Penelitian Ilmu Manajemen*, 6(2), 89–99. <https://doi.org/10.47663/jmbep.v6i2.58>
- Ramdhan, D. A., Setyadi, D., & Wijaya, A. (2018). Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran dan kemiskinan di kota samarinda. *Inovasi*, 13(1), 1. <https://doi.org/10.29264/jinv.v13i1.2434>
- Okta Ryan Pranata Yudha Pembangunan, J. E., Ekonomi, F., & Semarang, U. N. (2013). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, upah minimum, tingkat pengangguran terbuka, dan inflasi terhadap kemiskinan di indonesia tahun 2009-2011. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, Tingkat Pengangguran Terbuka Dan Inflasi Terhadap Kemiskinan Di Indonesia Tahun 2009-2011*, 91.

Waruwu, S. J. adil. (2016). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Belanja Pemerintah, dan Investasi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Indonesia Tahun 1995 – 2014. *Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma*, 1–186.

Badan Pusat Statistik Kota Surabaya. (2021). *Profil Kemiskinan di Kota Surabaya*. 15, 1–8.

Perwali. (2017). *Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2017*. 1–41.

Badan Pusat Statistik Kota Surabaya. (2021). *Berita Resmi Statistik : Pertumbuhan Ekonomi Kota Surabaya 2020*. 04, 6.
<https://surabayakota.bps.go.id/pressrelease/2021/03/18/236/pertumbuhan-ekonomi--kota-surabaya-2020.html>